

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian ini menggunakan referensi kepustakaan dari beberapa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya plagiarisme, menghindari kesamaan hasil, dan mengetahui sejauh mana pembahasan-pembahasan yang telah ada sebelumnya. Terdapat beberapa karya ilmiah yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini, diantaranya:

Jurnal dari Fariz Ruhiat, Dudy Heryadi, dan Akim yang diterbitkan pada Mei 2019 dalam *Andalas Journal of Internatinal Studies*, dengan judul “Stategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia).”<sup>18</sup> Penelitian ini berfokus pada strategi yang digunakan oleh Greenpeace dalam menangani polusi udara di Jakarta. Adapun konsep strategi NGO lingkungan yang diperkenalkan McCormick, dipakai untuk menganalisis strategi yang digunakan Greenpeace Indonesia dalam penanganan pencemaran udara di Jakarta. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Greenpeace menjalankan 2 dari 9 jenis strategi NGO yang diperkenalkan McCormick, yakni strategi *campaigning and organizing public protests* dan *undertaking research*. Strategi *campaigning and organizing public protests* berfokus pada upaya pemberitaan/propaganda melalui aksi nyata seperti demonstrasi, agar tercipta kesadaran masyarakat terhadap polusi udara yang terjadi. Sedangkan strategi *undertaking research*, berfokus pada penelitian yang telah dilakukan Greenpeace terhadap kondisi udara di Jakarta.

Terdapat persamaan maupun perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan pertama, kedua penelitian menempatkan Greenpeace sebagai objek penelitian. Selain itu, persamaan juga ditemukan dari isu yang diangkat yakni persoalan pencemaran udara di Jakarta. Adapun Perbedaan antara

---

<sup>18</sup> Ruhiat, F., Heryadi, D., & -, A. (2019). Strategi NGO Lingkungan Dalam Menangani Polusi Udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 16.

penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian ini, terdapat pada teori atau pendekatan yang digunakan. Jika penelitian ini menggunakan teori strategi NGO yang diperkenalkan McCormick, penulis menggunakan pendekatan teori peran *International Non Governmental Organizations* (INGO) yang diperkenalkan David Lewis dan Nazneen Kanji, sebagai alat analisa di penelitian yang akan dilakukan. Perbedaan lainnya juga dapat ditemukan dari pembatasan waktu yang dibuat oleh penulis yakni, rentan tahun 2017 sampai 2021 sehingga lebih memfokuskan hasil penelitian tersebut.

Rujukan kedua, berasal dari jurnal *EDP Sciences* 316 tahun 2021 dengan judul “*Greenpeace's role in pressuring the India government to overcome air pollution 2015-2018.*”<sup>19</sup>, Karya Deliani Azmi, Sugito, dan Muhammad Hanif, yang dimuat dalam *E3S Web of Conferences* dan diterbitkan pada November 2021. Ketiga peneliti menjabarkan upaya Greenpeace dalam menekan pemerintah India untuk mengatasi polusi udara. Melalui metode deskriptif analitis, para peneliti menggunakan teori *Trans-national advocacy networks* (TAN) untuk mengkaji tindakan yang dilakukan Greenpeace.

Hasil dalam penelitian ini menemukan, terdapat 3 jenis strategi yang lazim digunakan oleh *Trans-national advocacy networks* untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai yaitu, *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Leverage Politics*. Strategi *Information Politics* mengutamakan informasi yang dimiliki oleh kelompok untuk disebarkan secara cepat dan bertanggungjawab guna mempengaruhi atau mengubah kebijakan. Strategi *Symbolic Politics* menonjolkan simbol atau tindakan tertentu yang mampu menarik perhatian khalayak umum atau pihak yang dituju. Sedangkan strategi *Leverage Politics* merupakan kemampuan untuk menghimpun aktor-aktor yang memiliki pengaruh guna memperkuat gerakan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, strategi *Information Politics*, *Symbolic Politics*, dan *Leverage Politics* berhasil menekan pemerintah India melakukan tindakan terhadap masalah polusi yang terjadi.

Penelitian ini memiliki beberapa persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Persamaan ini dapat dilihat dari penempatan Greenpeace dan

---

<sup>19</sup> Azmi Zakiah Ahmad, D., Sugito, & Hanif Imaduddin, M. (2021). Greenpeace's role in pressuring the india government to overcome air pollution 2015-2018. *E3S Web of Conferences*, 316, 04015.

pencemaran udara sebagai objek penelitian. Selain itu, metode deskriptif analisis yang digunakan juga serupa dengan metode yang akan dilakukan oleh penulis dalam menjelaskan peran Greenpeace dalam penanganan pencemaran udara di Jakarta. Adapun perbedaannya, analisis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Transnational Advocacy Networks* (TAN), sedangkan penulis menggunakan teori peran *International Non Governmental Organizations* (INGO). Pemilihan pencemaran udara di India juga berbeda dengan penulis yang memilih pencemaran udara yang terjadi di Jakarta.

Rujukan ketiga, bersumber dari skripsi Agvia Hardinia dari Universitas Pembangunan Nasional, dengan judul “Peranan Greenpeace Dalam Penolakan Pembangunan PLTU di Batang Tahun 2011-2013”<sup>20</sup>. Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai penolakan proyek pembangunan PLTU di wilayah Jawa Tengah yang dilakukan oleh warga sekitar bersama dengan INGO lingkungan terbesar di dunia, Greenpeace. Melalui teori *civil society*, penelitian ini menemukan bahwa Greenpeace selalu mengedepankan keterbukaan dalam rangka mencapai tujuannya, baik dalam pertukaran informasi, perdebatan, maupun data-data penelitian yang mereka lakukan. Selain itu, teori *International Non Governmental Organizations* (INGO) juga digunakan dalam melihat peran Greenpeace sebagai aktor dalam mendukung penolakan warga terhadap proyek PLTU Batang. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Greenpeace berhasil mendorong pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menunda pembangunan proyek PLTU sampai tahun 2014.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini, dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan pertama terdapat pada objek penelitian, yakni Greenpeace. Persamaan kedua, terletak pada teori yang digunakan, yakni teori INGO untuk melihat peran Greenpeace sebagai aktor non negara, mampu terlibat dalam permasalahan lingkungan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan, terdapat pada ruang lingkup maupun permasalahan yang diangkat. Penelitian Agvia berfokus pada bagaimana peran Greenpeace dalam permasalahan pembangunan PLTU

---

<sup>20</sup> Hardinia, Agvia. (2014). Peranan Greenpeace Dalam Penolakan Pembangunan PLTU di Batang Tahun 2011-2013. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Pembangunan Nasional.

Batang. Sedangkan, penelitian yang akan dilakukan peneliti berfokus pada bagaimana peran Greenpeace dalam permasalahan pencemaran udara di Jakarta.

Rujukan keempat dalam penelitian ini, bersumber dari artikel Nicolas Mays dengan judul “*Interest Groups and Civil Society, in Public Health Policy*”<sup>21</sup> yang diterbitkan pada tahun 2008. Dalam penjabarannya, Mays menjelaskan bahwa pembentukan sebuah kebijakan publik seperti persoalan kesehatan masyarakat, tidak hanya melibatkan pemerintah semata melainkan menjadi lebih kompleks setelah kemunculan kelompok kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Mays menunjukkan bahwa kelompok kepentingan dan LSM memiliki kekuatan yang dapat berpengaruh terhadap kebijakan sebuah pemerintahan. Adapun bentuk pengaruh itu, dapat dilihat dari kemampuan LSM untuk memberikan informasi baru, membuat perdebatan, dan menentukan agenda kebijakan yang didukung oleh aktor-aktor penting. Oleh karena itu, penulis memilih artikel ini sebagai rujukan keempat karena Mays menekankan pentingnya kelompok kepentingan dan LSM dalam pembentukan sebuah kebijakan. Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai peran LSM, penelitian Mays memiliki banyak perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan, terutama berkaitan dengan objek penelitian.

Rujukan kelima, bersumber dari jurnal Evan Schofer, Natasha Miric, dan David John Frank dengan judul “*NGOs, INGOs, and Environmental Policy Reform, 1970-2010*”<sup>22</sup> yang terbit pada Maret 2016. Ketiga peneliti berfokus pada pengaruh organisasi non-pemerintah (NGO) baik pada tingkat domestik maupun internasional terhadap kebijakan pro lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintahan sebuah negara. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu *bottom-up perspective*, *interaction imagery*, dan *top-down view*. Pendekatan *bottom-up* menekankan pada peran NGO domestik untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan pro lingkungan. Pendekatan *interaction imagery* menonjolkan peranan NGO domestik dalam kebijakan pro lingkungan, namun dengan interaksinya dengan NGO internasional. Adapun *top-down*

---

<sup>21</sup> Mays, N. (2008). Interest Groups and Civil Society, in Public Health Policy. *International Encyclopedia of Public Health*, 650–658.

<sup>22</sup> Longhofer, W., Schofer, E., Miric, N., & Frank, D. J. (2016). NGOs, INGOs, and Environmental Policy Reform, 1970–2010. *Social Forces*, 94(4), 1743–1768.

*view* menekankan bahwa NGO internasional lebih menekan dan memberikan nilai positif dalam pembentukan kebijakan pro lingkungan sebuah negara.

Hasilnya, pendekatan *top-down view* merupakan pendekatan yang paling efektif dan berpengaruh terhadap lahirnya kebijakan pro lingkungan. NGO internasional cenderung memicu NGO domestik untuk melakukan reformasi kebijakan dalam negeri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah bahasan yang diangkat yaitu, peran NGO dalam mempengaruhi pembuatan kebijakan pro lingkungan. Adapun perbedaannya, dapat ditemukan pada teori yang digunakan, permasalahan yang diangkat, dan spesifikasi objek dalam penelitian.

Beberapa penelitian di atas, mampu memberikan gambaran dan membantu penulis dalam proses penulisan mengenai peran Greenpeace dalam persoalan lingkungan hidup. Hasil penelitian-penelitian terdahulu juga sangat membantu dan dapat digunakan sebagai hipotesis bahwa terdapat korelasi antara peran Greenpeace dengan penanganan persoalan pencemaran udara di Jakarta.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Teori Organisasi Internasional**

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, mendorong perubahan dalam pergaulan masyarakat internasional yang kian terbuka dan melintasi batas-batas negara. Oleh sebab itu, doktrin Westphalia (*Westphalian Doctrines*) yang menjadi acuan dan asal mula munculnya sistem hubungan internasional modern mendapatkan banyak gugatan, terutama dengan pandangan dan pendekatan yang digunakan. Konsepsi kedaulatan dan negara sebagai aktor utama dalam pergaulan internasional dianggap tidak lagi relevan, kedaulatan mutlak sebuah otoritas negara mengakibatkan memunculkan rivalitas antar satu dengan yang lain. Sifat eksklusif yang dianut dalam doktrin Westphalia juga dianggap tidak mampu menjamin integrasi sehingga berdampak pada ancaman keamanan yang mungkin terjadi.<sup>23</sup> Oleh karena itu, studi hubungan internasional mengalami transformasi dari yang semula bersifat sangat

---

<sup>23</sup> Ali Mukti, T. (2013). Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 2(2), 175–183.

“*states centric*” menjadi multidimensial terutama dengan turut memperhatikan aktor-aktor lain selain negara, salah satunya adalah organisasi internasional.

Dalam pemahaman umum, organisasi internasional merupakan organisasi yang diatur oleh hukum internasional dan memiliki personalitas hukum tersendiri melalui perjanjian atau instrumen lainnya.<sup>24</sup> Menurut Couloumbus dan Wolfe sebagaimana dikutip oleh Umar<sup>25</sup>, dalam level institusi organisasi internasional dapat dibagi ke dalam dua kategori, yakni *International Governmental Organizations* (IGO) dan *International Non Governmental Organizations* (INGO). Fenomena level institusi ini membuat organisasi internasional dapat pula didefinisikan sebagai kerangka pemerintahan dunia yang heuristik dan ideal suatu saat nanti. Dengan melakukan kerjasama lintas negara, baik antar pemerintah dengan pemerintah maupun antar kelompok non-pemerintah, organisasi internasional dituntut untuk mampu melaksanakan fungsinya dan mencapai tujuan-tujuan secara berkesinambungan dan melembaga.

Sebagai salah satu subjek hukum internasional, organisasi internasional terikat oleh hak dan kewajiban terhadap negara maupun organisasi internasional lainnya. Sejak dikeluarkannya *advisory opinion* dari Mahkamah Internasional di tahun 1949, organisasi internasional merupakan sebuah badan hukum yang memiliki *international personality* sehingga menjadikan organisasi internasional berkedudukan sama seperti sebuah negara, dapat melakukan tindakan hukum dan bertanggungjawab atas konsekuensi hukum dari tindakannya.<sup>26</sup> Pada mulanya, organisasi yang berkedudukan hukum dan masuk ke dalam subjek dalam HI hanyalah *International Governmental Organizations* (IGO), adapun *International Non Governmental Organizations* (INGO) baru memperoleh pengakuan instrumen dan status hukumnya melalui *Convention on the Recognition of The Legal Personality of INGO* pada tahun 1986 di Perancis.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Bakry, Umar Suryadi. (2019). *Dasar-Dasar Hubungan Internasional*. Jakarta: Kencana. Prenadamedia Group (hlm. 172).

<sup>25</sup> Umar Suryadi Bakry. (p. hlm. 173)

<sup>26</sup> Sefriani. (2016). *Peran Hukum Internasional Dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. (hlm. 193-195).

<sup>27</sup> Sefriani. (hlm. 197).

Guna menyikapi pola heterogen yang terjadi dalam dimensi kehidupan, organisasi internasional juga dapat dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup dan tujuan yang hendak dicapai. Dalam ruang lingkup, organisasi internasional dapat dibagi menjadi tiga yakni, organisasi *global* seperti *United Nation* (UN), organisasi *regional* seperti *ASEAN*, dan organisasi *sub-regional* seperti *Arab Maghreb Union*. Adapun mengenai tujuan yang hendak dicapai, organisasi internasional dapat dibagi menjadi dua yakni, *Multi-Purpose* seperti *European Union* (EU), dan *Single-Purpose* seperti *Nuclear Energy Agency*. Namun demikian, setiap organisasi internasional memiliki banyak perbedaan tergantung dari sumber daya, aturan, keuangan, dan tingkat birokrasi di dalamnya.<sup>28</sup>

Menurut Clive Archer dalam buku “*International Organizations Third Edition*”<sup>29</sup>, untuk dapat melihat bagaimana fungsi dari organisasi internasional, kita harus mengetahui cara kerja dalam sistem internasional. Dalam sistem, diperlukan sebuah input yang akan menghasilkan output. Lebih lanjut, Archer menjelaskan bahwa input yang dimaksud merupakan kepentingan maupun permintaan para aktor yang kemudian diintegrasikan dalam forum dan berakhir sebagai sebuah output.<sup>30</sup> Oleh sebab itu, Archer menilai dalam sistem internasional, terdapat beberapa fungsi organisasi internasional, diantaranya:

**Pertama**, organisasi internasional merupakan alat bagi sebuah negara maupun kelompok dalam mengartikulasikan sekaligus mengagregasi kepentingannya. Dalam melakukan hal ini, para aktor-aktor internasional membentuk kelompok atau grup yang memiliki kepentingan yang sama dan memanfaatkannya dalam forum-forum internasional.

**Kedua**, organisasi internasional berusaha untuk berkontribusi dan mengambil peranan dalam pembuatan norma dan nilai baru dalam sistem internasional. Dewasa

---

<sup>28</sup> Amici, M., & Cepiku, D. (2020). Roles, Types, and Definitions of International Organizations. In *Performance Management in International Organizations* (pp. 7–40). Springer International Publishing.

<sup>29</sup> Archer, Clive. (2001). *International Organizations Third Edition*. London, New York: Taylor & Francis Group.

<sup>30</sup> Clive Archer. (hlm. 94).

ini, pembentukan sebuah norma dalam hubungan internasional menjadi proses yang kompleks terutama ketika berbagai organisasi internasional turut berkontribusi.

**Ketiga**, organisasi internasional memiliki fungsi penting dalam memobilisasi individu maupun kelompok dengan tujuan yang sama untuk terlibat dalam sistem internasional.

**Keempat**, organisasi internasional berfungsi untuk dapat mengikat loyalitas dari seluruh anggotanya. Tujuannya tentu agar para anggota tidak merusak norma yang telah ada serta dapat bersifat kooperatif.

**Kelima**, organisasi internasional dapat berfungsi sebagai pembuat, pelaksana, maupun bertindak sebagai pengesah sebuah peraturan. Sifat anarki dalam sistem internasional membuat tidak adanya otoritas yang memiliki kewajiban formal dalam pembuatan peraturan. Oleh sebab itu, peraturan yang dibuat seperti, perjanjian, konferensi, dll, akan diserahkan kepada aktor-aktor internasional untuk dapat dilaksanakan. Seringkali, organisasi internasional akan melakukan pengamatan atas pelaksanaannya.

**Keenam**, organisasi internasional memiliki fungsi dalam penyampaian berbagai informasi yang selama ini cenderung didominasi oleh negara. Selain menyampaikan, organisasi internasional juga dapat mengumpulkan dan menyediakan informasi.

**Ketujuh**, organisasi internasional dapat menjalankan peran untuk melakukan kegiatan operasional seperti layaknya sebuah pemerintahan. Mulai dari menyediakan bantuan, pendanaan, berbagai layanan teknis, dll.<sup>31</sup>

Seiring dengan globalisasi yang terjadi saat ini, timbul pengertian yang bias terkait sebuah organisasi internasional, terutama *International Non Governmental Organizations* (INGO). Oleh sebab itu, sangat penting untuk membuat karakteristik yang jelas mengenai INGO. *International Non Governmental Organizations* (INGO) merupakan sebuah kelompok terorganisir yang bukan aktor tunggal dari sebuah negara, tidak terlibat dalam aksi kriminal, tidak menggunakan kekerasan, dan tidak didirikan

---

<sup>31</sup> Clive Archer. (hlm. 94-107).

untuk berorientasi pada keuntungan.<sup>32</sup> Dewasa ini, INGO telah terkenal karena dua jenis kegiatannya yang berbeda, namun memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Adapun dua kegiatan INGO yang dimaksud adalah pemberian pelayanan kepada pihak yang membutuhkan dan sekaligus sebagai organisasi advokasi kebijakan dan kampanye publik dalam mengejar transformasi sosial.<sup>33</sup> Menurut Salomon dan Anheier, *International Non Governmental Organizations* (INGO) memiliki karakteristik sebagai sebuah aktor independen, diantaranya:

**Pertama, Organized.** INGO merupakan kelompok yang terorganisasi dan memiliki struktur kelembagaan internal seperti legalitas hukum dan lain sebagainya. **Kedua, Private.** INGO merupakan bagian terpisah dari sebuah pemerintahan. Namun demikian, tidak berarti INGO tidak dapat berkolaborasi dengan pemerintah. Pemerintah tidak bisa mengatur dan memimpin INGO. **Ketiga, Non profit-distributing.** INGO tidak mengambil keuntungan dan menyebarkannya kepada para pimpinan organisasi. INGO juga tidak bersifat komersil dan segala keuangan diperuntukan untuk kegiatan dan misi organisasi. **Keempat, self governing.** INGO mengatur kegiatan mereka sendiri tanpa ada intervensi dari pihak luar melalui tata kelola internal. **Kelima, Voluntary.** INGO berisikan orang-orang atau kelompok yang suka rela tergabung di dalamnya. Volutarisme ini menjadikan INGO bersifat inklusif. **Keenam, Nonreligious.** INGO tidak melibatkan diri pada penyebaran sebuah ajaran maupun pendidikan agama. **Ketujuh, Nonpolitical.** INGO tidak terlibat dalam kegiatan mempromosikan kandidat untuk sebuah jabatan politik dan ikut serta dalam berbagai kegiatan politik praktis lainnya.<sup>34</sup>

Layaknya sebuah aktor, organisasi internasional memiliki sifat fungsional dalam melaksanakan aktivitasnya. Sifat fungsional ini, dimaksudkan untuk mencapai

---

<sup>32</sup> Willetts, Peter. (2011). *Non-Governmental Organizations in World Politics: The Contractions of Global Governance*. London & New York: Routledge Taylor & Francis Group. (hlm. 31).

<sup>33</sup> Hamilton, T., Spengler, N., Blaess, F., Dibb, R., DeJonge, A., Freise, M., ... Thuemler, E. (2010). Nongovernmental Organizations, Definition and History. *International Encyclopedia of Civil Society*. (hlm.1056–1062.).

<sup>34</sup> Salamon, Lester M. & Helmut K. Anheier. (1996). *Social Origins of Civil Society: Explaining the Nonprofit Sector Cross-Nationally*. Working Papers of the Johns Hopkins Comparative Nonprofit Sector Project, no. 22, edited by Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier. Baltimore: The Johns Hopkins Institute for Policy Studies. (hlm. 3-4).

kepentingan yang ingin dicapai sehubungan dengan menyediakan bantuan untuk menangani permasalahan yang timbul terhadap pihak-pihak yang terkait.<sup>35</sup> Sebagai salah satu bentuk organisasi internasional, hal tersebut juga berlaku bagi *International Non-Governmental Organization* (INGO). Secara umum, INGO menggunakan keahlian maupun kredibilitas yang dimiliki untuk menginformasikan masyarakat dan pemerintah tentang isu-isu tertentu guna meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>36</sup> Semua aktivitas tersebut merupakan bagian dari peran INGO sebagai pembela internasional bagi masyarakat dunia yang lemah, rentan, dan kurang terwakili. Dalam praktiknya, INGO menggunakan bentuk-bentuk protes yang menarik perhatian media guna membangkitkan kepentingan publik dan menekan pemerintah.<sup>37</sup>

Dewasa ini, berbagai INGO terus berkembang dalam berbagai bidang-bidang khusus, tidak terkecuali dalam isu-isu dan dimensi lingkungan hidup. Menurut Margaret Keck dan Cathryn Sikkink, pada tahun 1953 telah berdiri 2 INGO dengan fokus pada permasalahan lingkungan, kemudian jumlahnya meningkat menjadi 5 pada tahun 1963 dan bertambah sepuluh pada 1973.<sup>38</sup> Berbanding lurus dengan degradasi lingkungan yang terus terjadi, INGO lingkungan terus berkembang hingga saat ini. Sebuah INGO lingkungan memiliki peranan yang penting dalam upaya mendorong perlunya kebijakan lingkungan, memobilisasi dukungan publik untuk konservasi lingkungan, serta upaya melindungi hutan dan spesies yang terancam punah.<sup>39</sup> Untuk dapat menyelesaikan dan menjalankan peranannya, INGO lingkungan dituntut untuk mampu memiliki *influence*. Dalam hal ini, sebuah INGO lingkungan mendapat

---

<sup>35</sup> A.A, Perwita. & Y.M, Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. (hlm. 97).

<sup>36</sup> Schneiker Andrea, Charlotter Dany. (2015). Experts, advocates and activists. *D+C e-Paper*, 10 October, 21–25.

<sup>37</sup> Schneiker Andrea, Charlotter Dany. (hlm.22).

<sup>38</sup> Margaret Keck and Cathryn Sikkink. (1998). *Activists beyond Borders: Advocacy Networks in International Politics*. Ithaca, NY: Cornell University Press. (hlm.11).

<sup>39</sup> Cenar, Luliana, & Delia Mihaltan. (2015). Non-Governmental Organisations and Environmental Protection. Realities and Perspectives. *Journal of Environmental Protection and Ecology*. 16 (4). 1422–1430.

pengaruh dengan cara mengisi relung yang tidak bisa diisi oleh aktor internasional lainnya.<sup>40</sup>

Menurut Kate O'Neill dalam buku "*The Environment and International Relations*", INGO merupakan salah satu aktor yang secara langsung maupun tidak mempengaruhi tata kelola lingkungan secara global, dan memainkan peranan penting untuk menyoroti permasalahan lingkungan di seluruh dunia.<sup>41</sup> Dalam aktivisme yang dilakukannya, kelompok-kelompok lingkungan hidup termasuk INGO, dapat dibedakan dalam beberapa metode. Pertama, kelompok yang memfokuskan perhatiannya pada permasalahan lingkungan global secara eksplisit. Kedua, kelompok lingkungan yang aktif menghadiri forum-forum internasional baik dalam rangka negosiasi maupun konferensi tingkat tinggi (KTT) global. Ketiga, timbulnya jaringan advokasi transnasional dan masyarakat global yang sangat signifikan perkembangannya terkait studi aktivisme dan gerakan sosial selama satu dekade terakhir.<sup>42</sup>

Diawal kemunculannya, *International Non Governmental Organizations* (INGO) lingkungan merupakan respon dari krisis kerusakan lingkungan yang semakin parah. Menurut Robert Goodin sebagai mana dikutip oleh Suharko, perkembangan krisis lingkungan dapat dipisahkan menjadi dua periode. Pada periode pertama, perkembangan krisis lingkungan dipengaruhi oleh sebuah buku dengan judul "*Silent Springs*" karya Rachel Carson di tahun 1962. Dalam bukunya, Carson memberikan kritik sehubungan dengan masifnya penggunaan produk pestisida di Amerika Serikat. Carson menyampaikan kesimpulannya bahwa produk pestisida telah menimbulkan dampak yang berbahaya bagi manusia, salah satunya penyakit kanker. Publikasi Carson kemudian mendapatkan perhatian dan berhasil membangkitkan kelompok masyarakat untuk memikirkan dan peduli pada kepentingan lingkungan. Fenomena kepedulian masyarakat di Amerika Serikat akan pentingnya kelestarian lingkungan menginspirasi gerakan-gerakan serupa di luar negeri. Sedangkan pada periode kedua,

---

<sup>40</sup> Yolanda Maria, dkk. (2020). *Organisasi Internasional*. Malang: Inteligencia Media. (hlm. 96).

<sup>41</sup> O'Neill, Kate. (2009). *The Environment and International Relations*. Cambridge: Cambridge University. (hlm. 57).

<sup>42</sup> Kate O'Neill. (hlm. 58-59).

krisis lingkungan kedua memiliki skala global baik pada skala kebijakan maupun akar penyebabnya<sup>43</sup>.

Krisis lingkungan yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia, membuat isu ini memerlukan solusi bersama. Persoalan yang sebelumnya mengisi tatanan *low politic* mulai menjadi isu utama yang hadir dalam agenda-agenda internasional. Meskipun demikian, perbedaan kondisi krisis lingkungan yang terjadi di setiap negara-negara di dunia, membuat INGO lingkungan memiliki karakteristik dan filosofi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam bukunya yang berjudul “*The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy*”, John McCormick membagi INGO lingkungan kedalam enam karakteristik<sup>44</sup>, antara lain:

**Pertama, Northern NGO.** Northern NGO merupakan NGO yang berfokus kepada konsekuensi lingkungan akibat perkembangan industri dan budaya konsumerisme. Dalam pandangan utamanya, NGO ini beranggapan bahwa *free market* perlu dibelenggu oleh regulasi sehingga dapat mengurangi polusi dan konsumerisme.

**Kedua, Southern NGO.** NGO dalam ini, adalah mereka yang memiliki fokus pada konsekuensi lingkungan akibat ketidaksetaraan dan kemiskinan dalam sistem perekonomian global. Kesenjangan ekonomi yang ditimbulkan dari pergeseran industri pencemaran dari utara ke selatan, menjadi pandangan utama dalam pergerakan NGO yang tergabung dalam kelompok ini.

**Ketiga, Conservative and pragmatism NGO.** NGO yang tergabung dalam kelompok ini adalah mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik guna memberikan masukan maupun pengaruh lahirnya sebuah kebijakan.

**Keempat, Green organization.** Kelompok ini didasari oleh keinginan mencari perubahan hubungan mendasar antara manusia dengan manusia, maupun manusia dengan lingkungan. Mereka berpandangan, dominasi manusia terhadap alam dalam proses pembangunan memerlukan pengelolaan lingkungan yang efektif. NGO green

---

<sup>43</sup> Suharko. (1998). Model-Model Gerakan NGO Lingkungan: Studi Kasus di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2 (1), 40-62.

<sup>44</sup> McCormick, John. (2010). *The Role of Environmental NGOs in International Regimes in The Global Institution, Law, and Policy*. Washington DC: CQ Press. (hlm. 102).

organization juga mengkritisi struktur politik, budaya konsumerisme, dan menginginkan paradigma baru dalam isu lingkungan.

**Kelima**, *Radical organization*. NGO dalam kelompok ini cenderung menggunakan konfrontasi dan aksi nyata berupa tindakan langsung, guna menarik perhatian khalayak umum pada permasalahan lingkungan.

**Keenam**, NGO yang merepresentasikan kelompok-kelompok sosial ekonomi yang turut berkepentingan dalam persoalan lingkungan, seperti kaum minoritas, perempuan, maupun bisnis.<sup>45</sup>

Perkembangan NGO lingkungan juga terjadi di Indonesia. Dalam konteks ini, perkembangan INGO lingkungan di Indonesia melalui tiga fase, diantaranya: fase sebelum adanya demokratisasi, fase persiapan demokratisasi, dan fase keputusan demokratisasi.<sup>46</sup>

Pada fase sebelum demokratisasi, INGO lingkungan berhasil mempengaruhi persepsi masyarakat Indonesia yang peduli lingkungan dan mengubah kegiatan dari sekedar mencintai alam ke kegiatan konservasi. Hal ini berhasil membuahkan NGO lokal Yayasan Indonesia Hijau (YIH) yang didirikan tahun 1978. Pendirian yayasan ini tidak bisa dilepaskan dari proyek perlindungan orangutan yang dilakukan oleh NGO internasional *World Wide Fund for Nature* (WWF) di Gunung Leuser, Sumatra. Pada fase ini, peran penting juga dimainkan oleh seorang teknokrat ekonomi sekaligus Menteri Lingkungan Hidup pertama, Prof. Emil Salim. Prof. Emil aktif melibatkan berbagai kelompok pencinta alam dan NGO lingkungan lokal dalam pengambilan keputusan di Kementeriannya. Fenomena ini mendorong perkembangan NGO lingkungan yang semakin masif. Pada kepemimpinannya, Prof. Emil berhasil memprakarsai berdirinya NGO lingkungan terbesar di Indonesia, yakni Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Hingga kini, WALHI terus berfokus pada isu-isu lingkungan dan berhasil menghasilkan sejumlah LSM lingkungan di Indonesia.

---

<sup>45</sup> John McCormick. (hlm. 101-103)

<sup>46</sup> Nomura, K. (2007). Democratisation and environmental non-governmental organisations in Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 37(4), 495–517.

Pada fase persiapan demokratisasi, tekanan untuk dilaksanakannya reformasi demokrasi membuat berbagai kelompok mengalami tekanan dari pemerintah. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) mengambil peran penting untuk memberikan bantuan hukum kepada aktivis yang terlibat masalah, termasuk aktivis lingkungan. Pada masa ini, di tahun 1985, terbentuk *International Non Governmental Organizations Forum on Indonesia* (INGI). INGI aktif menyuarakan kritik terkait penggunaan bantuan asing untuk pembangunan di Indonesia. Di tahun 1993, kelompok seperti *Centre for Environmental Law* (ICEL) juga terbentuk sebagai akibat dari pengaruh INGO yang menyadarkan NGO Indonesia terkait persoalan HAM dan demokrasi.

Sedangkan pada fase keputusan demokrasi, NGO lingkungan di Indonesia semakin menekankan jalur advokasi dan partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan pro lingkungan. Demokratisasi yang terjadi, juga menyebabkan pergeseran strategi NGO dari yang semula bersikap konfrontasi ke arah yang lebih kolaboratif. Nilai inklusifitas yang melekat pada demokrasi, juga berdampak pada dukungan masyarakat terhadap NGO dan INGO, sehingga mereka mulai mendapat dukungan masyarakat luas, memiliki sistem pendanaan yang mandiri tanpa ada intervensi pendonor, dan perilaku melibatkan masyarakat juga ditunjukkan, terutama bagi INGO yang dianggap menerima dana dari luar negeri. Salah satu INGO yang muncul difase ini, adalah kehadiran Greenpeace di Indonesia pada tahun 2005.

Melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-128.AH.01.06 tahun 2009, Greenpeace secara resmi terdaftar secara resmi dan memfokuskan diri pada persoalan lingkungan di Indonesia. Sebagai organisasi internasional yang berfokus pada isu lingkungan, Greenpeace sangat aktif menyuarakan pentingnya melindungi dan menghentikan kejahatan lingkungan. Awal kehadirannya di Indonesia, Greenpeace memfokuskan aktivitasnya pada upaya penghentian deforestasi pada hutan-hutan di Indonesia. Dewasa ini, seiring berjalannya waktu Greenpeace secara konsisten menyuarakan dan mengkampanyekan beberapa persoalan, yakni persoalan kehutanan, kelautan, perubahan iklim, pemanasan global, dan permasalahan pencemaran air dan udara.

### 2.2.2 Teori Peran International Non Governmental Organization

Sebuah organisasi internasional memiliki sifat fungsional dalam melaksanakan aktivitasnya. Sifat fungsional ini, dimaksudkan untuk mencapai kepentingan yang ingin dicapai sehubungan dengan menyediakan bantuan untuk menangani permasalahan yang timbul terhadap pihak-pihak yang terkait.<sup>47</sup> Dalam konteks INGO, keahlian maupun kredibilitas tersebut digunakan untuk menginformasikan masyarakat dan pemerintah tentang isu-isu tertentu guna meningkatkan kesadaran terhadap permasalahan yang dihadapi.<sup>48</sup>

Dalam buku “*Non-Governmental Organizations and Development*”, David Lewis dan Nazneen Kanji menjelaskan bahwa terdapat tiga peranan utama dari sebuah *International Non Governmental Organizations* (INGO), diantaranya adalah *implementers, catalysts* dan *partners*.<sup>49</sup>

Pada tatanan *Implementers*, INGO memiliki kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengarahkan berbagai sumber daya kepada yang memerlukan. Kegiatan ini dapat berupa penyediaan barang maupun jasa. Adapun dalam pelaksanaannya, INGO dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah maupun pendonor atau melakukannya secara mandiri karena semakin meningkatnya peran INGO dalam menanggapi situasi darurat seperti bencana dalam kerangka kemanusiaan. Salah satu peran *implementers* yang dilakukan oleh Greenpeace dalam kasus pencemaran udara di Jakarta, dapat dilihat melalui penelitian-penelitian maupun analisis Greenpeace, baik pada tingkat internasional maupun nasional terhadap persoalan yang terjadi, seperti kondisi kualitas udara di Jakarta, dampak yang timbul dari pencemaran, legalitas atau kekuatan hukum, hingga masukan dan saran yang ditujukan kepada pemerintah untuk mengatasi persoalan.

---

<sup>47</sup> A.A, Perwita. & Y.M, Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya. (hlm. 97).

<sup>48</sup> Schneiker Andrea, Charlotter Dany. (2015). Experts, advocates and activists. *D+C e-Paper*, 10 October, 21–25.

<sup>49</sup> Lewis, David, & Nazneen Kanji. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. London, New York: Taylor & Francis Group. (hlm.12-13).

Pada tatanan *catalysts*, INGO memiliki peran penting dalam melakukan perubahan. Kemampuan mempromosikan perubahan ini erat kaitannya dengan fungsi INGO untuk memfasilitasi, menginspirasi, dan berkontribusi dalam pembuatan norma dan nilai baru dalam sistem internasional. Dalam prosesnya, peran *catalysts* juga mencakup dalam kegiatan penyebaran nilai dan norma kepada masyarakat yang dapat memberikan pengaruh kepada sebuah kebijakan. Dalam kasus pencemaran udara di Jakarta, Greenpeace Indonesia memainkan peran penting untuk merubah kebijakan dan perilaku pemerintah berdasarkan dukungan dari masyarakat. Untuk dapat menjalankan peranan tersebut, sebagai organisasi yang memiliki struktur, salah satu unsur penting yang sangat berkaitan dengan hal tersebut adalah bidang kampanye. Melalui kampanyenya, Greenpeace berusaha memberikan informasi kepada masyarakat sekaligus meminta dukungan untuk memperkuat gerakannya mengenai penanganan permasalahan, seperti yang terjadi pada kasus pencemaran udara di Jakarta.

Pada tatanan *partners*, INGO memiliki peran untuk bermitra dengan berbagai pihak, salah satunya adalah melibatkan diri dalam sebuah proyek bersama guna mencapai sebuah tujuan yang hendak dicapai. Dalam hal ini, INGO memiliki kemampuan untuk membentuk jaringan dan menjaga netralitas untuk tidak tergantung pada berbagai pihak. Sejak awal pembentukannya, Greenpeace sudah sangat terbiasa berkerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), hingga korporasi.

Hal tersebut, dapat kita temukan juga dari berbagai kolaborasi yang dilakukan Greenpeace dalam menangani pencemaran udara yang terjadi di Jakarta. Sebagai aktor independen yang tidak mendapat desakan dan tekanan dari manapun, Greenpeace secara sukarela dan bertanggungjawab melakukan aksi langsung terkait pencemaran udara, demi menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat Jakarta. Namun demikian, untuk mengkampanyekan sebuah isu dan menyebarkan informasi terkait kerusakan lingkungan, diperlukan kemitraan kolaboratif guna mendorong terciptanya solusi dari persoalan yang terjadi. Beberapa bentuk aksi kolaboratif yang dilakukan oleh Greenpeace berkaitan dengan pencemaran udara di Jakarta, dapat dilihat dari kerja sama Greenpeace dengan beberapa pihak.

## 2.3 Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1: Kerangka Berfikir**

